

# **Analisis Perubahan Pengakuan Nauru dari Republik Taiwan kepada People's Republic of China dengan Chequebook Diplomacy**

**Aprianti & Haidir Al Husaini**  
*Universitas Jenderal Soedirman*

## **Abstrak**

*Kehadiran China di Pasifik didukung dengan tiga tujuan utama; mendapatkan akses SDA dan investasi, persaingan dalam mendapatkan dukungan diplomatik dengan Taiwan, dan membendung dominasi Amerika Serikat yang ada di kawasan Pasifik. Dalam mencapai tujuan keduanya, China melakukan strategi diplomasi dollarnya dengan aktif memberikan bantuan ekonomi agar negara-negara di kawasan Pasifik mengalihkan pengakuan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China, khususnya yang dilakukan China kepada Nauru. Dengan menggunakan metode penelitian explanatory research akan dijelaskan alasan, faktor penyebab terjadinya, serta tujuan dari fenomena perubahan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru dari Taiwan kepada China, fenomena ini menunjukkan bagaimana chequebook diplomacy dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah kebijakan luar negeri suatu negara dan dinamika yang terjadi di kawasan Pasifik setelah terjadinya perubahan pengakuan yang dilakukan oleh Nauru dari Taiwan ke China. Penelitian ini menemukan bahwa chequebook diplomacy efektif digunakan sebagai alat dalam mengubah kebijakan luar negeri Nauru yang dilakukan oleh China. China berhasil mendorong Nauru untuk melakukan perubahan pengakuan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China.*

**Kata Kunci:** *Chequebook Diplomacy; Diplomasi Dollar; Kebijakan Luar Negeri; Pengakuan Diplomatik; Nauru-China-Taiwan.*

## **Abstract**

*China's presence in the Pacific is supported by three main objectives; gaining access to natural resources and investment, competing for diplomatic support with Taiwan, and stemming the dominance of the United States in the Pacific region. In achieving its second goal, China carried out its dollar diplomacy strategy by actively providing economic assistance so that countries in the Pacific region shifted recognition of their diplomatic relations from Taiwan to China, especially what China did to Nauru. By using the explanatory research method, it will be explained the reasons, causal factors, and objectives of the phenomenon of changing diplomatic recognition made by Nauru from Taiwan to China, this phenomenon shows how chequebook diplomacy can be used as a tool to change a country's foreign policy and the dynamics that occur in the Pacific region after the change of recognition made by Nauru from Taiwan to China. This study found that chequebook diplomacy was effectively used as a tool in changing Nauru's foreign policy by China. China successfully encouraged Nauru to change its diplomatic relations recognition from Taiwan to China.*

**Keywords:** *Chequebook Diplomacy; Dollar Diplomacy; Foreign Policy; Diplomatic Recognition; Nauru-China-Taiwan.*

## Latar Belakang

Peran dan dominasi Amerika Serikat di Pasifik pasca Perang Dunia II sangatlah kuat. Adanya *balance of power* di Pasifik dibentuk oleh peran penting yang dimainkan oleh Amerika Serikat berdasarkan tujuan kebijakan keamanan dan kemakmuran di mana Amerika Serikat mempertahankan hegemoni dengan membangun jaringan keamanan di sana. Namun pada akhir abad ke 20, kekuasaan di Pasifik sedikit demi sedikit bergeser ke China, yang diakibatkan oleh kebangkitan dari China itu sendiri (Putri 2020). Pertumbuhan ekonomi China yang naik signifikan menjadikan salah satu faktor kebangkitan China di Pasifik (Hariri 2020). Menurut Lei dan Sophia (2021), kehadiran China di Pasifik memiliki setidaknya tiga tujuan yaitu, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan investasi, memenangkan dukungan diplomatik kepada negara-negara di Pasifik di forum internasional seperti di PBB dan bersaing dengan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan diplomatik, dan yang terakhir adalah untuk menyerang balik pembendungan dan pengepungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Pasifik dan memastikan kebangkitan China di tingkat sistemik (global). Salah satu dari tiga tujuan China hadir di Pasifik adalah berjuang untuk mendapatkan pengaruh yang dilakukan melalui persaingan dengan Taiwan. Kedua negara tersebut memiliki sejarah yang panjang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Di kawasan Pasifik, Nauru adalah salah satu dari hanya dua negara, selain Vanuatu, yang telah mengalihkan kesetiaannya dari China ke Taiwan atau sebaliknya lebih dari satu kali dari tahun 1971 hingga 2024 (Elfiansyah 2020). Nauru menjaga hubungan dengan Taiwan di tahun 1980-2002, kemudian berpaling ke China di tahun 2002, dan kembali lagi ke Taiwan di tahun 2005, setelah itu Nauru kembali mengakui China di Tahun 2024.

Sejarah hubungan diplomatik antara Nauru dan Taiwan dimulai sejak 4 Mei 1980. Hubungan diplomatik kedua negara ditonjolkan melalui kerja sama agrikultur, energi, beasiswa, dan pelatihan serta kerja sama pembangunan kedua negara (Dayant et al. 2023). Kerja sama ini terus berlanjut hingga kedua negara sepakat untuk pembebasan visa yang memungkinkan warga negara mereka bisa bebas keluar masuk baik di Taiwan maupun di Nauru. Lebih jauh lagi, kedekatan kedua negara ini juga ditandai dengan adanya pengiriman para pengungsi Australia ke Taipei untuk mendapatkan bantuan medis dan perawatan psikologi serta kebutuhan darurat medis lainnya. Bahkan dalam sebuah kunjungan kepresidenan Taiwan ke Nauru, Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen menyebut Nauru sebagai “*super good friend*” (Dayant et al. 2023).

Pada kesempatan lain, Presiden Nauru, Waqa, juga menyindir China secara terselubung dalam pidatonya di PBB yang berbunyi; *“Ada pihak-pihak yang memiliki agenda sendiri untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, dan sangat disayangkan ketika mereka memaksakan kehendak dan kesombongan mereka terhadap rakyat Pasifik. Mereka yang tidak menghormati perilaku dan kehendak para pemimpin Pasifik harus memahami bahwa mereka akan diabaikan. Ini adalah Forum untuk rakyat Pasifik dan sangat penting bahwa hal ini harus dipahami dan dihormati”* (Waqa 2018).

Dari sini kita bisa melihat hubungan yang terjalin baik di antara Nauru dan Taiwan. Namun, pada 15 Januari 2024, beberapa hari setelah terpilihnya Presiden baru Nauru, Pemerintah Nauru mengeluarkan pernyataan mengenai pemutusan hubungan dengan Taiwan. Pernyataan ini disebut sebagai langkah pertama yang secara signifikan akan memajukan pembangunan dari Nauru (Reuters and Associated Press 2024). Sedangkan respon pemerintah China sangat mengapresiasi dan menyambut baik keputusan yang dilakukan oleh Nauru untuk kembali melanjutkan hubungan diplomatik dengan China. Hal ini berdasarkan pada apa yang diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri China, *“Sebagai negara yang berdaulat dan mandiri, Nauru mengumumkan telah memutuskan apa yang disebut sebagai ‘hubungan diplomatik’ dengan Taiwan dan bersedia memulihkan hubungan dengan China. China mengapresiasi dan menyambut baik keputusan pemerintah Nauru. Hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan”* (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 2024).

Pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Nauru ini bukan tanpa sebab, perubahan pengakuan ini diakibatkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi Nauru, seperti adanya pengaruh dari Pemerintah China. Seperti yang kita tahu, China dengan taktik diplomasi dolarnya dimana China secara aktif menggunakan bantuan ekonominya untuk mendorong negara-negara Pasifik agar mengalihkan pengakuan dari Taiwan ke China (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 2024). Hal ini didukung dengan pengaruh dari China sendiri yang terbilang cukup besar di Kawasan Pasifik dan di waktu yang sama, mereka juga mencari keuntungan pembangunan dari adanya diplomasi dollar tersebut (Yulianingsih 2024). China juga sangat berambisi dalam mengikis pengaruh Taiwan di Kawasan Pasifik dengan alasan hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari China. Faktor berikutnya terkait hubungan diplomatik, pada dasarnya Nauru memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara baik China maupun Taiwan tetapi, Taiwan tidak memiliki sekutu yang besar dan kuat seperti yang dimiliki oleh China. Kemungkinan keputusan ini sudah

aja sejak lama mengingat sebelumnya Nauru juga pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan di tahun 2002 sebelum akhirnya mengembalikannya lagi di tahun 2005 (Yulianingsih 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi *chequebook diplomacy* digunakan oleh China untuk mengubah kebijakan luar negeri Nauru, serta implikasinya terhadap dinamika kekuatan di kawasan Pasifik.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *explanatory research*. Menurut Sugiyono (2017) *explanatory research* adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan dari variabel-variabel yang objek dari penelitian ini sendiri adalah hubungan diplomatik dari Nauru dengan Taiwan dan China serta hubungan antara Taiwan-China yang sangat mempengaruhi dinamika hubungan diplomatik dari Nauru dengan Taiwan. Kompleksitas hubungan diplomatik ini akan dirincikan dan dijelaskan sehingga ditemukan faktor-faktor yang dapat ditarik kesimpulannya. Teknik pengumpulan dan analisis data akan dilakukan dengan cara analisis dokumen dan berita terkait topik perubahan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru kepada Taiwan, artikel dan jurnal mengenai hubungan dari China dan Taiwan, serta artikel dan jurnal mengenai bantuan yang diberikan China di Asia Pasifik khususnya di Nauru. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan analisis studi kasus dengan tambahan referensi dari fenomena yang sama yang terjadi di *Solomon Island*. Dengan menggunakan metode penelitian *explanatory research* yang didukung oleh analisis data di atas, akan ditemukan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat dari keputusan Nauru mengubah pengakuan diplomatiknya.

## Landasan Teoritis

*Chequebook diplomacy* atau *checkbook diplomacy* merupakan jenis diplomasi yang berdasarkan pada hutang yang dilakukan dalam hubungan bilateral antar negara (Admin 2022). *Chequebook diplomacy* merupakan bentuk diplomasi dimana suatu negara menawarkan insentif ekonomi seperti bantuan pembangunan atau bantuan ekonomi untuk mendapatkan dukungan diplomatik dari negara yang dibantu tersebut (Dayant dan Moyle 2020). *Chequebook diplomacy* sendiri digunakan oleh Taiwan dan China untuk “membeli” dukungan politik negara di panggung internasional. Beberapa contohnya adalah Pemerintahan Niger yang menerima pinjaman sebesar 50 juta USD dari Taiwan dan memberikan pengakuan kepada Taiwan di tahun 1992. China sendiri juga pernah memberikan pinjaman untuk melakukan pembangunan di El Salvador

dan El Salvador memutuskan untuk mengakui China di tahun 2018 sebagai gantinya. *Chequebook diplomacy* biasanya difokuskan kepada negara-negara kecil yang lebih memerlukan bantuan ekonomi sehingga Taiwan dan China seringkali berebut negara di negara kecil tersebut (Nemeskéri and Zádori 2020). *Chequebook diplomacy* merupakan salah satu cara bagi negara untuk mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan kekerasan (*soft power*). Dengan adanya aliran dana kepada negara tertentu maka diharapkan akan adanya perubahan kebijakan yang bersifat lebih bersahabat kepada negara penerima. Negara kecil yang secara relatif lebih mudah dipengaruhi ekonominya membuat negara besar memakai *chequebook diplomacy* untuk mendapatkan tujuan tertentu (Numadi 2023).

Blackwill dalam bukunya *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, menyatakan bahwa China memberikan contoh terbaik dalam menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi tatanan politik internasional. Dalam kasus ini adalah mengubah pengakuan negara dari Taiwan ke China dan sebaliknya. China juga memakai *chequebook diplomacy* tersebut untuk mendorong Taiwan lebih dekat kepada reunifikasi dengan China (Blackwill dan Harris 2016). *Australian Broadcasting Corporation* pernah mengeluarkan laporan di tahun 2016 yang berisi bahwa perdagangan antara China dan Negara Pasifik bertambah dua kali lipat dalam satu tahun, dan China memberikan bantuan sebesar 1.8 miliar USD di tahun 2006-2016 kepada negara pasifik (Milne 2020). Dapat kita lihat dari data di atas bahwa China dan Taiwan saling bersaing menggunakan *chequebook diplomacy* untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional.

Dalam studi kasus lain, *chequebook diplomacy* sangat efektif dalam dijadikan alat untuk merubah kebijakan luar negeri seperti yang terjadi antara China dan India. Dalam meningkatkan pengaruh politiknya, India bersaing dengan China melalui *chequebook diplomacy* dengan cara memberikan subsidi bantuan ekonomi ke negara-negara berkembang yang ada di sekitarnya. Menurut Ambassador T P Sreenivasan (2019), India telah mengeluarkan anggaran sebesar Rs. 17,800 crores yang difokuskan untuk bantuan luar negeri, Nepal dan Mauritius telah mendapatkan bantuan sebanyak ₹1,050 crore dan ₹1,100 crore, Afghanistan juga mendapatkan bantuan sebesar ₹400 crore, Bangladesh mendapatkan Rs 175 crore, Sri Lanka Rs 250 crore, dan Mongolia mendapatkan Rs 5 crore. Peningkatan anggaran bantuan yang dilakukan India ini semata-mata untuk menjaga eksistensi pengaruh politiknya di negara-negara tersebut juga untuk menyaingi pengaruh dari China.

## Hasil dan Diskusi

### Prinsip *One China Policy* di Pasifik

Pada tahun 1949, dibentuklah suatu pihak anti-PRC (People's Republic of China), yaitu Republic of China (ROC) atau biasa kita dengar sebagai Taiwan yang dalam pembentukannya didukung oleh Kuomintang (KMT), di tahun tersebut juga menandai konfrontasi antara Cina dan Taiwan. Sampai saat ini China masih menganggap Taiwan sebagai provinsi yang merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga tidak memenuhi syarat dalam menjalin hubungan antar negara (Dewi dan Dewi 2018). Dalam hubungan internasional kita juga mengenal istilah "*One China Policy*" yang merupakan suatu upaya dari Pemerintah China untuk mengisolasi Taiwan dan juga mengupayakan penyatuan kembali China secara damai. Menurut Didier (2018), *One China Policy* mengakui bahwa hanya ada satu China (PRC) dan Taiwan adalah bagian dari China melalui prinsip "one China, two systems", yang memungkinkan para penentang doktrin ini untuk terhindar dengan otonomi relatif bagi Taiwan. Meskipun kebijakan *One China Policy* mendapat reaksi negatif dari Taiwan, karena Taiwan tidak berkeinginan bergabung dengan China, dan Taiwan menganggap negaranya telah berdaulat secara de facto, jadi sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara, China tetap menjalankan kebijakan One China Policy dengan membuat aturan ketat bagi negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok; yang mana negara-negara tersebut tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan Taiwan (Dewi dan Dewi 2018).

Lalu mengapa China harus memilih Pasifik sebagai arena untuk bergulat dengan Taiwan? Sebenarnya China bukanlah pemain baru di Pasifik, tidak lama setelah diproklamirkannya pendirian Republik Rakyat China (RRC) oleh Mao Zedong pada 1 Oktober 1949, bergerak untuk menjalin diplomasi dengan negara-negara di Pasifik. Di tahun 1970 setelah Fiji merdeka, China menjalin diplomasi dengan negara tersebut. Setelahnya, pergerakan China terus meningkat sejalan dengan Uni Soviet yang mulai melirik kawasan Pasifik tersebut (Dugis 2018). Setelah perang dingin usai, fokus China di Pasifik tidak langsung menuju persaingan dengan Taiwan, karena China melihat kembalinya negara barat seperti Australia, New Zealand, dan Uni Eropa ke Pasifik. Dinamika hubungan internasional di kawasan Pasifik ditandai dengan adanya dominasi dari negara-negara barat. Menurut penjelasan dari Dugis (2018) terdapat tiga indikator dari kuatnya dominasi dari negara-negara barat di Pasifik, pertama ada sejarah dari negara barat yang dulunya merupakan negara-negara kolonial di Pasifik, seperti Amerika Serikat, Australia, Perancis, dan New Zealand. Kuatnya pengaruh dari negara kolonial, terlihat dari sistem politik yang dianut oleh di negara-negara Pasifik cenderung menggunakan demokrasi

liberal setelah negara di Pasifik tersebut merdeka. Kedua, sebutan Pasifik sebagai “Danau (bagi negara-negara) Barat” dapat dilihat dari bantuan keuangan yang negara-negara Pasifik terima dari mantan negara-negara yang menjajahnya. Bahkan tercatat bantuan yang mereka intensifkan sampai dengan pertengahan periode 1990, yang mengindikasikan kekuatan-kekuatan kolonial masih konsisten mengakarkan pengaruhnya di sana. Indikator terakhir yaitu ideologi Kristiani yang dibawa oleh negara-negara kolonial menjadi agama yang dominan di kawasan Pasifik dan sekaligus menandai sentimen anti-komunis yang kuat.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki sikap menerima dan bersedia mematuhi terhadap kebijakan *One China Policy*, meskipun awalnya sempat terjadi beberapa penundaan penerimaan *One China Policy* di kawasan ini dikarenakan mereka memiliki kedekatan yang erat dengan negara donor utama mereka, yaitu Amerika Serikat dan Australia (Trisakti dan Zahidi 2022). Salah satu cara China tetap mengukuhkan keberadaannya Pasifik adalah melakukan menjanjikan bantuan dana, contohnya adalah pada Tahun 2019, China berjanji untuk memberi bantuan kepada Kepulauan Solomon dan Kiribati yang menghasilkan peralihan pengakuan oleh kedua negara kepulauan tersebut dari Taiwan kepada China (Dayant et al. 2023).

Persaingan antara China dengan Taiwan tidak lain adalah untuk menarik perhatian negara-negara Pasifik yang dalam dinamikanya diwarnai dengan pemberian bantuan ekonomi dalam berbagai bentuk serta pemberian bantuan keuangan dalam jumlah yang signifikan bagi negara-negara Pasifik atau biasa dikenal dengan diplomasi dollar (Dugis 2018). Tetapi hal tersebut justru melenceng dari tujuan utama pemberian bantuan, yaitu mengentaskan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian di kawasan Pasifik. Seperti apa yang dijelaskan oleh Dugis (2018) bahwasannya mendapatkan pengakuan diplomatik adalah maksud dari persaingan antara China dengan Taiwan, yang seringkali diistilahkan sebagai “chequebook diplomacy”.

## **Persaingan China dan Taiwan**

Hubungan China dan Taiwan bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, ambisi China terhadap Taiwan begitu besar. China ingin Taiwan menjadi bagian dari China, hanya ada satu China dan menginginkan Taiwan bukan sebagai negara yang berdiri sendiri. Ambisi ini bahkan sampai pada titik dimana China menginginkan semua negara yang bekerja sama dan berhubungan diplomatik dengan China harus mengakui adanya *One China Policy*. Kebijakan ini mengharuskan negara lain yang berhubungan dengan China harus mengakui bahwa Taiwan masih satu bagian dari China hanya terpisah wilayah kepulauannya saja (BBC 2021). Namun, di sisi lain

Taiwan menginginkan negaranya berdiri sendiri tanpa keterikatan apapun dari China. Taiwan menganggap bahwa mereka memiliki pemerintahan mereka sendiri sebagai negara yang terpisah (Iswara 2022).

Jika dilihat dari sejarahnya, konflik antara China dan Taiwan bermula ketika pecahnya perang saudara antara pasukan Chiang Kai-shek dengan pasukan Komunis Mao Zedong yang kemudian dimenangkan pasukan Komunis Mao Zedong. Setelah perang saudara tersebut, penduduk China terbagi menjadi dua, yang ada di wilayah negara Taiwan juga yang ada di wilayah negara China sendiri. Dari adanya perang saudara ini, masih belum ada kesepakatan bagaimana status dari wilayah Taiwan mengenai apakah diakui sebagai sebuah negara atau tidak. Sedangkan apabila kita melihat dari Taiwan, mereka sudah memiliki konstitusinya sendiri di mana para pemimpinnya dipilih secara demokratis. Pemerintahan Taiwan sempat menduduki kursi Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, sejak tahun 1970-an beberapa negara menganggap bahwa perwakilan Taiwan sudah tidak dapat lagi menjadi perwakilan sejati dari China, setahun kemudian PBB mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke Beijing dan itu menyebabkan banyak negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan hingga tersisa 15 negara saja dan kebanyakan merupakan negara-negara kecil di kawasan Pasifik dan Oceania (Iswara 2022).

Pada tahun 1980, hubungan kedua negara sempat membaik ketika Taiwan melonggarkan aturan mengenai kunjungan dan investasi dari China. China juga sempat menawarkan usul mengenai adanya satu negara dengan dua sistem pemerintahan. Tetapi, usul ini ditolak mentah-mentah oleh Taiwan dan sejak saat itu China berambisi bahwa pemerintahan Taiwan merupakan bentuk dari ketidaksahan. Oleh karenanya, China terus berusaha untuk mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya bukan sebagai negara yang berdiri sendiri (Iswara 2022).

Sejak saat itu, China mulai melakukan banyak cara untuk mengurangi pengaruh Taiwan di dunia internasional salah satunya di kawasan Pasifik. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana China yang mulai meningkatkan banyak bantuan ekonomi bagi negara-negara yang berhubungan diplomatik dengannya. Bahkan China tercatat sebagai pendonor tingkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Australia yang banyak memberikan bantuan ekonomi di kawasan Pasifik. China juga mulai meningkatkan frekuensi kehadirannya dalam acara dan aktivitas yang ada di kawasan Pasifik khususnya dalam diplomasi kultural seperti, pendirian sekolah hukum, pertukaran pelajar, hingga pengajaran Bahasa Mandarin di stasiun televisi lokal (Dugis 2018).

Keputusan Nauru untuk merubah pengakuan dari Taiwan ke Cina atau sebaliknya didasari oleh banyak hal, salah satunya adalah kepentingan nasional Nauru terkait penambangan fosfat. Nauru pernah menjadi negara kaya dengan penambangan fosfat pada periode 1970-1980-an, namun pada periode 1990-an sampai awal abad 21, Nauru mengalami defisit anggaran dan penambangan fosfat mengalami penurunan (Guo et al. 2024). Untuk itu negara tersebut membutuhkan mitra untuk berinvestasi atau memberi bantuan kepada Nauru. Kondisi Cina yang pertumbuhan ekonominya pesat pasca adanya kebijakan keterbukaan ekonomi era Deng Xiaoping dan dilanjutkan oleh Jiang Zemin pada awal 2000-an, menjadikan Nauru tertarik untuk mengubah pengakuannya dari Taiwan ke Cina. Pada akhirnya Nauru mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Cina pada tahun 2002, akan tetapi, ekonomi negara kepulauan tersebut tampaknya tidak diuntungkan oleh perubahan kebijakan luar negerinya, dan Nauru memutuskan untuk mengalihkan hubungan kembali ke Taiwan pada tahun 2005 (Guo et al. 2024).

Dalam menggaet hati Nauru, China melakukan diplomasi dollar dengan memberikan bantuan ekonomi secara signifikan dan sering kali bersifat politis dengan tujuan untuk menarik Nauru untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan serta beralih ke pengakuan diplomatik ke China. Selain menggunakan bantuan ekonomi berupa diplomasi dollar, China juga melakukan strategi lainnya seperti, China menggunakan dua cara pendekatan yang disebut sebagai “*combination of carrots and sticks*” dimana China memberikan suatu negara penghargaan juga tekanan apabila negara tersebut mencoba untuk memberikan pengakuan diplomasi ke Taiwan, China juga memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada negara-negara yang mencoba untuk mengakui Taiwan. Dalam kesempatan lain, diketahui bahwa China juga ikut mempengaruhi pemilihan umum yang ada di Nauru dengan cara mendukung kandidat yang pro-China. Hal ini kemudian berdampak pada perubahan arah kebijakan luar negeri Nauru dan mengurangi pengakuan Nauru terhadap Taiwan (Green dan Bluth 2024).

Melalui *Belt and Road Initiative (BRI)*, China memberikan bantuan hibah dan pinjaman uang kepada Nauru untuk membantu proyek infrastruktur di negara tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, proyek pembangkit listrik tenaga fotovoltaiik, hingga pelabuhan Aiwo (Wibowo 2024). China juga mengenalkan *Juncao Technology*, sebuah teknologi yang memungkinkan para petani kecil untuk menumbuhkan jamur dari potongan rumput kering tanpa menebang pohon dan merusak lingkungan. Selain itu, menurut Everington (2024), China dilaporkan telah menawarkan bantuan kepada Nauru sebanyak US\$100 juta. Dengan strategi diplomasi dollar dan taktik lain yang digunakan oleh China kepada

Nauru, hal itu perlahan mulai menggeser pengaruh Taiwan di Nauru. Hal ini juga didukung oleh kekuatan ekonomi China yang besar mampu menandingi Taiwan yang merupakan negara kecil dengan kekuatan ekonomi yang cukup lemah. Pengaruh China di dunia internasional juga mendukung pergeseran keberpihakan Nauru yang awalnya mengakui Taiwan.

Dalam suatu kesempatan di Forum Kepulauan Pasifik, China secara langsung diundang dan hadir dalam forum tersebut. Di Forum itu sendiri, Nauru memiliki posisi penting berupa badan pengambil keputusan politik utama. Dengan adanya perubahan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru kepada China hal ini akan berdampak pada China berpotensi untuk mempengaruhi keputusan politik di tingkat regional dan secara perlahan mengurangi pengaruh Taiwan di Pasifik (Sachdeva 2024).

Diplomasi dollar yang dilakukan China berhasil mempengaruhi kebijakan luar negeri Nauru berupa pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Nauru terhadap Taiwan. Nauru juga mendapatkan insentif ekonomi yang cukup dalam mendukung pembangunan di negaranya dibandingkan yang telah diberikan oleh Taiwan. Pemutusan hubungan diplomatik ini tentu memberikan dampak yang signifikan bagi Taiwan berupa penurunan jumlah sekutu diplomatik, tercatat kini hanya 12 negara saja yang memberikan pengakuan diplomatik kepada Taiwan (*Articoli Report* 2024). Dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru, Taiwan juga dihadapkan pada kemungkinan adanya negara-negara lain yang akan memutuskan hubungan diplomatik kedepannya. Selain itu, Taiwan juga menghadapi tantangan berupa dinamika kekuatan geopolitik di Kawasan Pasifik mengingat kawasan tersebut menjadi sasaran empuk bagi Amerika Serikat dan China dalam memperbesar dan mempertahankan pengaruhnya dalam dunia internasional.

Meskipun demikian, sebelum Nauru beralih kepada China, Taiwan telah lama menjadi mitra pembangunan kecil untuk Nauru. Taiwan memberikan berbagai macam bentuk bantuan sebagai upaya untuk mempererat hubungan diplomatik yang dimiliki kedua negara tersebut. Dalam bidang kesehatan misalnya, Taiwan telah mengirimkan tim medis tetap dan secara rutin mengadakan misi medis spesialis untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Nauru, khususnya bagi perempuan dan anak-anak (*President Tsai Receives Credentials From New Nauru Ambassador to the ROC Chitra Jeremiah-News releases-News & Activities Office of the President Republic of China(Taiwan)* 2016). Selain itu, Taiwan juga mendirikan Dana Kesehatan Pasifik senilai US\$2 juta guna mendukung pelayanan kesehatan di negara-negara Pasifik, termasuk Nauru (Hsu 2020).

Dalam sektor pendidikan, Taiwan menawarkan program beasiswa yang memungkinkan puluhan mahasiswa Nauru melanjutkan studi di Taiwan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia Nauru di berbagai bidang. Di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Taiwan melalui Misi Teknik Taiwan mengembangkan proyek budidaya jamur, produksi telur, dan pertanian lokal di Nauru. Taiwan juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan mendanai pemasangan lampu jalan tenaga surya dan membantu memulihkan layanan penerbangan nasional Nauru (Ministry of Foreign Affairs Republic of China 2023). Bahkan, Taiwan berperan dalam pembangunan stadion untuk Micronesian Games 2026 serta bekerja sama dalam patroli maritim untuk melindungi wilayah perairan Nauru. Semua bentuk bantuan ini menunjukkan bahwa Taiwan tidak tinggal diam dalam mempertahankan sekutu diplomatiknya, termasuk melalui pendekatan *soft diplomacy* yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan keamanan maritim. Namun, kekuatan ekonomi dan strategi agresif diplomasi dollar yang dilakukan oleh China akhirnya mampu menggeser loyalitas Nauru, yang sebelumnya telah menikmati banyak bentuk bantuan dari Taiwan.

Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan yang diberikan oleh China kepada Pasifik Selatan, terus menurun. Bantuan ekonomi yang sempat mencapai puncaknya di tahun 2016 baik bantuan berupa pinjaman atau dana hibah. Dalam tahun tersebut paket bantuan yang diberikan China kepada Pasifik sebesar 333 juta dollar, bantuan tersebut merupakan bantuan dengan nominal terbesar yang diberikan oleh China kepada Pasifik dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 (Deng 2022). Setelahnya bantuan China terus turun dan berada di titik terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 111 juta dollar. Menurut Deng (2022) penurunan bantuan tidak berarti hubungan China dengan Pasifik juga ikut menurun, China memiliki taktik seperti memperkuat melalui kerja sama keamanan, contohnya kesepakatan keamanan antara China-Kepulauan Solomon, yang telah meningkatkan hubungan Beijing dengan Honiara, atau kegiatan komersial seperti perdagangan atau investasi asing langsung.

Penurunan bantuan China kepada Pasifik salah satunya adalah dampak dari adanya kebijakan *deleveraging* Beijing yang dimulai sejak tahun 2015 (Deng, 2022). Kampanye *deleveraging* adalah salah satu dari satu dari 'lima tugas utama' pemerintah China pada tahun 2021. Kebijakan tersebut adalah lanjutan dari melonjaknya rasio utang China terhadap PDB yang berada di level 30% akibat adanya Covid-19 (Yeung 2021). Selain faktor dalam negeri yaitu pengetatan kontrol Beijing atas investasi asing oleh badan-badan milik negara, dan juga upaya untuk mengatasi masalah utang dalam negeri China, kekhawatiran Beijing terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik yang memiliki kerentanan terhadap tekanan hutang

karena faktor dalam negeri mereka, yaitu keterbatasan pasar domestik, jumlah penduduk yang sedikit, keterbatasan lahan, dan lokasi geografis yang terpencil, yang semuanya menghambat ekspor dan impor, juga merupakan asal muasal dari penurunan bantuan China kepada Pasifik. Hal ini juga didukung dengan adanya kesadaran dari negara-negara Pasifik atas kualitas bantuan dana yang diberikan oleh China. Menurut Dayant et al. (2023) hutang yang ditawarkan oleh China dalam membangun proyek infrastruktur lebih mahal dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh negara lain. Hal ini kemungkinan juga berpengaruh pada minat negara-negara Pasifik di proyek pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, saat ini negara-negara di Pasifik juga sedang mengalami situasi fiskal dan uang yang memburuk, sehingga seharusnya China lebih berhati-hati dalam memberikan bantuan ekonominya dan memastikan agar hutang tersebut tidak bertambah.

Taiwan menyadari bahwa penurunan bantuan yang diberikan China dapat mempengaruhi posisinya di Kawasan Pasifik. Meskipun China berusaha mengisolasi Taiwan secara diplomatik dengan menekan negara-negara untuk tidak mengakui keberadaannya, Taiwan tetap aktif dalam membangun kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara lain tanpa menuntut pengakuan resmi. Strategi *balancing* dilakukan oleh Taiwan dalam merespon hal ini.

Strategi *balancing* ini dilakukan dengan dua cara, yakni *external balancing* dan *internal balancing*. *External balancing* ini mengacu pada penanganan ancaman eksternal dengan mengandalkan sumber daya eksternal. Taiwan memperkuat dan memperbesar aliansinya dengan Amerika Serikat dan sekutu Amerika Serikat, seperti Jepang, Kanada, dan Australia. Strategi ini ditandai dengan adanya perjanjian-perjanjian seperti *Mutual Defense Treaty* dan *Taiwan Relations Act*. Perjanjian ini difokuskan untuk kerja sama pertahanan dalam menghadapi potensi ancaman dari China dan hubungan kerja sama non-diplomatik yang dilakukan antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Sedangkan *internal balancing* yang dilakukan oleh Taiwan adalah meningkatkan anggaran militer dalam negerinya (Fatmawati et al. 2023).

### **Bantuan Cina di Nauru**

Setelah penambangan fosfat Nauru sudah tidak lagi menjadi penopang ekonomi di negaranya, pemerintah Nauru tentunya harus menentukan dan memutuskan sektor ekonomi apa saja yang dapat dijalankan untuk kehidupan masyarakat di negaranya. Salah satu sektor yang menjadi pendapatan utama Nauru adalah sektor perikanan. \$43,14 juta tahun fiskal lalu dari biaya yang dibayarkan oleh kapal-kapal berbendera asing

untuk melakukan apa yang disebut “*purse seine fishing*” atau pemasangan jaring sepanjang beberapa kilometer dalam bentuk lingkaran, yang kemudian ditutup dari bawah dengan tali penarik, untuk menangkap ikan tuna dan spesies lainnya (Davies dan Doherty 2018). Nauru sendiri memiliki otoritas atas zona ekonomi eksklusif laut seluas 320.000 kilometer persegi, yang tentu saja memiliki sumber daya laut yang melimpah. Kesempatan tersebut tentu saja tidak boleh disia-siakan oleh Cina, karena dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, pastinya akan ada ruang yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan, baik dari Nauru maupun Cina untuk bekerja sama di bidang perikanan dan budidaya laut, yang mana Nauru membutuhkan Cina karena negara tersebut memiliki teknologi penangkapan ikan berkembang dengan baik (Global Times 2024).

Keputusan perubahan pengakuan oleh Nauru, salah satunya adalah akibat dari permasalahan yang harus mereka hadapi, yaitu kemerosotan ekonomi, kesulitan keuangan yang parah, dan pengangguran yang signifikan. Apalagi pembangunan ekonomi Nauru sekarang ini mulai melirik pada pariwisata, yang pada gilirannya bergantung pada infrastruktur yang kuat dan masuknya wisatawan asing. (Qingqing et al. 2024). Tentunya negara tersebut membutuhkan investor yang dapat menyuntikkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pariwisata di negaranya. Daya tarik Cina di sini adalah BRI yang mana salah satunya adalah bantuan pembangunan infrastruktur di negara yang menjadi mitra kerja sama Cina. Setelah mengumumkan perubahan pengakuan dari Taiwan ke Cina, Nauru bergerak cepat untuk bertemu dengan Xi Jinping. Pada 25 Maret 2025 David Adeang, selaku Presiden Nauru bertemu dengan Xi Jinping di Beijing untuk membahas kerja sama antara kedua negara. Xi Jinping menyambut baik Adeang dan secepat untuk bekerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur, serta memberikan bantuan kepada Nauru untuk pembangunannya yang mandiri dan berkelanjutan tanpa ikatan politik (Jingwen 2024). Selain itu kerja sama antara Cina dan Nauru di bawah BRI yang diusulkan oleh Cina dapat dipercepat menyusul keputusan Nauru terkait pemutusan “hubungan diplomatik” dengan Taiwan (Global Times 2024). Keputusan Cina untuk bergerak cepat dalam kerjasamanya dengan Nauru merupakan hal yang tepat, agar negara tersebut tidak kembali ke pangkuan Taiwan dan menjadikan episode persaingan antara Cina dengan Taiwan di Nauru berhasil dimenangkan oleh Cina.

Nauru juga dijanjikan akan mendapat bantuan dana berupa hibah sebesar 100 juta dollar setiap tahunnya dari China, dalam bentuk hibah dan pembayaran utang (Everington 2024). Dikutip dari pernyataan Melville (2024) situasi dalam negeri Nauru yang dilanda ketidakpastian pasca hengkangnya perbankan satu-satunya di negara tersebut asal Australia,

menjadikan situasi semakin pelik. Pasalnya Nauru menggunakan mata uang Australia dan sangat bergantung pada pendapatan dari lisensi penangkapan ikan dan pusat pemrosesan regional untuk pengunjung yang dikelola oleh pemerintah Australia, menghadapi kemunduran pada bulan Desember 2023.

Hengkangnya Bendigo Bank, lembaga perbankan Nauru yang berasal dari Australia, menempatkan negara kepulauan kecil ini dalam situasi finansial yang genting. Tanpa kehadiran bank formal, Nauru kehilangan akses terhadap layanan perbankan dasar seperti pembayaran gaji pegawai negeri, transaksi bisnis, hingga pengelolaan dana negara. Ketergantungan Nauru pada dolar Australia semakin memperparah kondisi, sebab absennya lembaga keuangan Australia menyulitkan arus transaksi lintas negara. Ketidakstabilan ini bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mengancam kestabilan sosial domestik. Untuk menangani masalah tersebut Nauru telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bank of China “untuk mengeksplorasi solusi dan opsi bagi permasalahan perbankan” (Collins 2024). Jika Bank of China mengganti Bendigo Bank, bank tersebut dapat mempromosikan renminbi daripada dolar Australia dan perubahan mata uang akan menguntungkan kepentingan China sekaligus memperlancar transaksi di masa depan antara Cina dan Nauru (Collins 2024).

## Kesimpulan

Perubahan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru dari Taiwan ke China merupakan bentuk dari adanya *Chequebook Diplomacy*. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana China memberikan bantuan ekonomi di daerah Pasifik khususnya kepada Nauru. China bahkan dikatakan sebagai pendonor terbesar ketiga setelah Amerika dan Australia. Fokus China dalam memberikan bantuan ekonomi khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Nauru, seperti bantuan ekonomi dalam membangun Pelabuhan Aiwo, pembangkit listrik fotovoltaik, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya ambisi China untuk memenangkan dukungan diplomatik kepada negara-negara di Pasifik di forum internasional dan bersaing dengan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan diplomatik. Perubahan pengakuan yang dilakukan Nauru ini juga berdasarkan pada keuntungan yang didapatkan oleh Nauru dari China yang lebih besar dibandingkan dengan Taiwan. China merupakan negara yang kaya ekonominya mampu memberikan bantuan secara besar-besaran kepada Nauru. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir bantuan yang diberikan oleh China dikatakan sedikit menurun, eksistensi China di Nauru tidak hilang justru semakin berkembang hingga akhirnya Nauru memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan beralih ke China.

## Daftar Pustaka

### Buku

Blackwill, Robert D., dan Jennifer M. Harris, 2018. *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. Cambridge: Harvard University Press.

### Artikel Jurnal

Dewi, Inneke F., dan Karina Utami D., 2018. “Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok”, *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2): 161–158. <https://doi.org/10.18196/hi.72136>

Didier, Laurent, 2018. “Economic diplomacy: The “one–China policy” effect on trade”, *China Economic Review*, 48: 223–243. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.11.003>

Dugis, Vinsensio, M.A., 2018. “Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik”. *Jurnal Global & Strategis*, 9(1): 1. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.1-18>

Fatmawati, Fatmawati et al., 2023. “Strategi Balancing Taiwan Terhadap Tiongkok Dalam Merespon Reunifikasi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4):6-9. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26621>

Green, Michael, dan Christopher Bluth, 2024. “China’s Covert Influence in Pacific Island Elections”, *International Affairs Monitor*, 14(1): 22–35.

Guo Xiaoming et al., 2023. “Nauru’s Shifting Allegiances: Economic Drivers of Foreign Policy in the Pacific Islands”, *Asia-Pacific Policy Review*, 18(1): 41–59.

Hariri, Siti N., 2020. “Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Pasifik”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, 4(1): 33–45. <https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>

Nemeskéri D., dan Zádori I., 2020. “The Importance of Diplomacy,” *Belvedere Meridionale*, 32(3): 103–114. <https://doi.org/10.14232/belv.2020.3.8>.

- Numadi, Katong R., 2023. "Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019", *Jurnal Hubungan Internasional* 16(2): 338–358. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.44353>
- Putri, Adinda N., 2020. "PERSAINGAN PENGARUH DI PASIFIK SELATAN: PENGALIHAN DUKUNGAN DIPLOMATIK KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK", *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(2): 130–144. <https://doi.org/10.33541/japs.v3i2.1294>
- Trisakti, Mulyadi, dan M., Syaprin Z., 2022. "Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan", *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 4(2): 14–29. <https://doi.org/10.29303/ijps.v4i2.106>
- Lei, Yu, dan Sophia, S., 2021. "China-Pacific Island Countries Strategic Partnership: China's strategy to reshape the regional order", *East Asia*, 39(1): 81–96. <https://doi.org/10.1007/s12140-021-09372-z>
- Qingqing Z., 2024. "Tourism Infrastructure Needs in Pacific Island States: Case of Nauru", *Journal of Island Studies*, 12(3): 88–102.

### Artikel Online

- Admin, 2022. "Chequebook Diplomacy - Definition and Examples for UPSC GS-II" [Online]. Dalam <https://byjus.com/free-ias-prep/credit-imperialism-upsc-notes/> [diakses pada 25 Juli 2024].
- Articoliereport, 2024. "Diplomatic Challenges in Taiwan: A Look through Nauru and Tuvalu's Lens" [Online]. Dalam <https://www.geopolitica.info/diplomatic-challenges-taiwan/> [diakses pada 24 Juli 2024].
- BBC News, 2021. "What is the "One China" policy?" [Online]. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354> [diakses pada 3 Agustus 2024].
- Collins, Jessica, 2024. "Western banks are vacating the Pacific, and Nauru is turning to China" [Online]. Dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/western-banks-are-vacating-pacific-nauru-turning-china> [diakses pada 30 April 2025].
- Dayant, Alexandre, et al., 2023. "Chinese aid to the Pacific: decreasing, but not disappearing" [Online]. Dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/chinese-aid-pacific-decreasing-not-disappearing> [diakses pada 25 Juli 2024].
- Dayant, Alexandre, dan Euan Moyle, 2023. "Chequebook diplomacy in the Pacific: Not just the big fish" [Online]. Dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/chequebook-diplomacy-pacific-not-just-big-fish> [diakses pada April 13, 2024].

- Global Times, 2024. "Procuratorial organ rejects lawsuit against Chinese Nobel Prize winner Mo Yan: plaintiff" [Online]. Dalam <https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309530.shtml> [diakses pada 24 Juli 2024]
- Iswara, Aditya J., 2022. "Kenapa China dan Taiwan Bermusuhan?" [Online]. Dalam, [https://internasional.kompas.com/read/2022/08/04/194500670/kenapa-china-dan-tai-wan-bermusuhan-?page=all#google\\_vignette](https://internasional.kompas.com/read/2022/08/04/194500670/kenapa-china-dan-tai-wan-bermusuhan-?page=all#google_vignette) [diakses pada 24 Juli 2024].
- Jingwen L., 2024. "Xi Jinping Meets President of Nauru: Bilateral Ties Strengthened" [Online] Dalam <https://www.xinhuanet.com/> [diakses pada 24 Juli 2024]
- Melville, Aja, 2024. "Nauru's Diplomatic Shift Signals Increasing Chinese Dominance in the Indo-Pacific" [Online]. Dalam <https://dsm.forecastinternational.com/2024/05/28/naurus-diplomatic-shift-signals-increasing-chinese-dominance-in-the-indo-pacific/> [diakses pada 25 April 2025].
- Milne S., 2020. "Chequebook diplomacy: The battle for influence in the south Pacific" [Online]. Dalam <https://www.defenceconnect.com.au/joint-capabilities/5727-cheque-book-diplomacy-the-battle-for-influence-in-the-south-pacific> [diakses pada 14 April 2024].
- China (Taiwan), 2023. "The Republic of China (Taiwan) and the Republic of Nauru sign joint communiqué to reaffirm diplomatic relations, highlighting their close ties" [Online]. Dalam [https://en.mofa.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=1328&s=101845](https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=101845) [diakses pada 26 April 2025].
- Office of the President Republic of China(Taiwan), 2016. "President Tsai receives credentials from new Nauru Ambassador to the ROC Chitra Jeremiah" [Online]. Dalam <https://english.president.gov.tw/NEWS/4949> [diakses pada 26 April 2025].
- Sachdeva, Sam, 2024. "Nauru's China switch adds to Pacific pressures" [Online]. Dalam <https://newsroom.co.nz/2024/01/17/naurus-china-switch-adds-to-pacific-pressures/> [diakses pada 3 Agustus 2024].
- Sreenivasan, T.P., 2019. "Beginning of 'Chequebook diplomacy'" [Online]. Dalam <https://diplomatist.com/2019/07/15/beginning-of-chequebook-diplomacy/> [diakses pada 24 Juli 2024].
- Wibowo, Eko S., 2024. "Menlu Nauru Menyatakan Niat untuk Bergabung dalam Kerja Sama Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok" [Online]. Dalam <https://bharataradio738.com/beritalengkap/ORAW1BQ4ff> [diakses pada 4 Agustus 2024].

Yeung, Karen, 2021. "China's debt-reduction campaign a 2021 priority as coronavirus drives surge in borrowing" [Online]. Dalam <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3124654/chinas-debt-reduction-campaign-2021-priority-coronavirus?module=inline&pgtype=article> [diakses pada 25 Juli 2024].

Yulianingsih, Tanti, 2024. "Nauru Putus Hubungan dengan Taiwan Beberapa Hari Usai Presiden Baru Terpilih, China Menyambut" [Online]. Dalam <https://www.liputan6.com/global/read/5505900/nauru-putus-hubungan-dengan-taiwan-beberapa-hari-usai-presiden-baru-terpilih-china-menyambut?page=3> [diakses pada 25 Juli 2024]

Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), 2023. "The Republic of China (Taiwan) and the Republic of Nauru sign joint communiqué to reaffirm diplomatic relations, highlighting their close ties" [Online]. Tersedia dalam [https://en.mofa.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=1328&s=101845](https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=101845) [diakses pada 26 April 2025].

## **Publikasi Resmi**

Ministry of Foreign Affairs Republic of the People's Republic of China, 2024. "*Joint Communiqué on the Resumption of Diplomatic Relations Between the People's Republic of China and the Republic of Nauru*" [Online]. Tersedia dalam [https://www.fmprc.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531\\_11367509.html](https://www.fmprc.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367509.html) [diakses pada 26 April 2025].

Waq, Baron D., 2018. "Statement by His Excellency Baron Divavesi Waqa, President of the Republic of Nauru at the United Nations General Assembly, 73rd session" [Online]. Tersedia dalam <https://gadebate.un.org/en/73/nauru> [diakses pada 25 Juli 2024]

## **Skripsi**

Elifansyah, Daniel, 2020. *A Struggle For Recognition: Analyzing Nauru Government's Decision To Politically Recognize The Republic Of China Over The People's Republic Of China In 2005*. Skripsi Sarjana. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.